

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2016-2021
KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|---------|
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 4 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 5 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | |
| 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | 6 |
| 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah | 14 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 21 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 23 |
| BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS | |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 24 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 25 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi | 27 |
| 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS | 27 |
| 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis | 30 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN..... | 32 |
| BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... | 35 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... | 36 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 41 |
| BAB VIII. PENUTUP..... | 42 |

DAFTAR TABEL

| | halaman |
|--|---------|
| Tabel 2.1 Aset Kecamatan Sewon | II-9 |
| Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sewon | II-13 |
| Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sewon | III-1 |
| Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati | III-3 |
| Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon Ditinjau dari Implikasi RTRW | III-3 |
| Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon Ditinjau dari Implikasi KLHS | III-4 |
| Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sewon | V-1 |
| Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan Sewon | V-1 |
| Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul | VI-1 |
| Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | VII-1 |

DAFTAR GAMBAR

| | halaman |
|---|---------|
| Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sewon | II-2 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Perubahan Renstra kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Sewon Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
 - 8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021;
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
 - 10) Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan se-Kabupaten Bantul.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Sewon dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2019 dan Renja Tahun 2020 dan 2021.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DESA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kecamatan Sewon menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya. Kecamatan Sewon dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Bantul, Kecamatan Sewon mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Sewon menyelenggarakan fungsi:

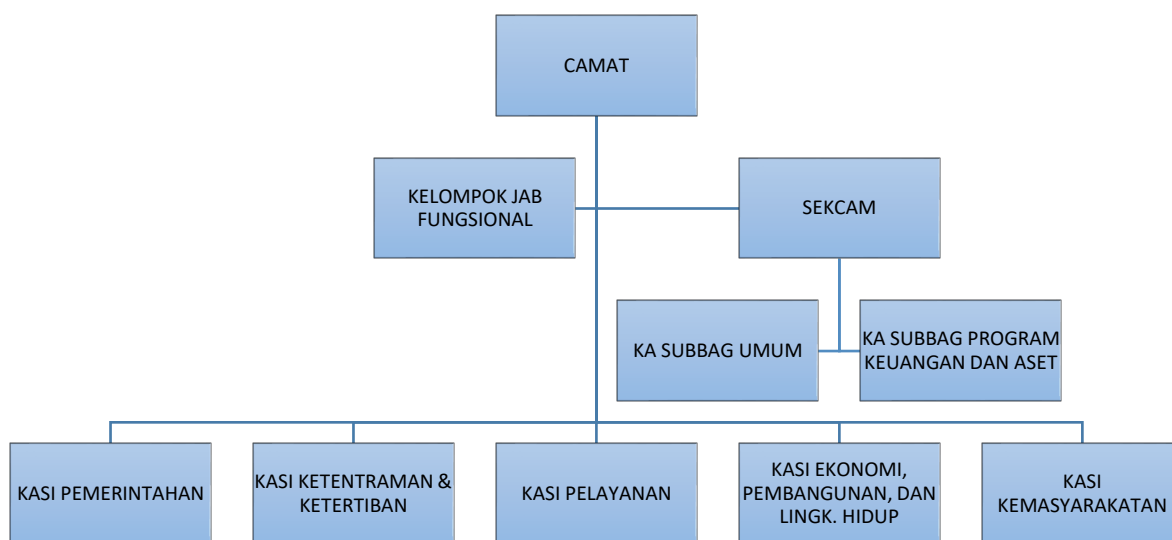
- a. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. pelaksanaan kesekretariatan kecamatan dan;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

Adapun susunan organisasi Kecamatan Sewon adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pelayanan;

- e. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- f. Seksi Kemasyarakatan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan susunan organisasi Kecamatan Sewon adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Sewon

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan barang milik daerah;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - e. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - f. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian program, keuangan dan Aset

- 1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.

- 2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan perencanaan, evaluasi, keuangan dan aset.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan evaluasi;
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan.
 - g. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan keuangan;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kecamatan, meliputi :
 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 3. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 5. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah
 6. Daerah provinsi dan Daerah kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 8. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat kecamatan;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pertanahan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi kependudukan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah desa dan pamong desa;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di tingkat kecamatan, yang meliputi :
1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa;
 3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa;

4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Desa;
 6. fasilitasi pengusulan penjabat lurah desa;
 7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah desa dan pamong desa;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

- 1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Muspika, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan politik di tingkat kecamatan;
 - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana alam;
 - e. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan di tingkat kecamatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelayanan

- 1) Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan pelayanan umum;
 - d. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kecamatan;
 - e. pelaksanaan standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan;
 - f. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan dan desa;
 - h. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sub Bagian; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- 1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- 2) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.
- 3) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan.
- 4) Dalam melaksanakan tugas Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana kerja Seksi;
- a. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
 - b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kecamatan;
 - c. pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Sewon dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang.

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Sewon sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan. Sekretaris kecamatan (Sekcam) selaku koordinator sekretariat kecamatan, berada di bawah camat dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Tugasnya membantu camat di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu 5 kepala seksi sebagai pembantu dan pelaksana tugas camat sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di

Kecamatan Sewon per Maret 2017 adalah 22 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 7 orang pejabat eselon IV, dan 13 orang jabatan fungsional umum.

**DAFTAR SUSUNAN PEJABAT STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM (JFU)
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
PER 30 JULI 2018**

| No | Jabatan | Nama | Gol/ Ruang |
|-----------|--|---|-----------------------|
| 1 | Camat | Drs. Danang Erwanto, Msi | IV/b |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | Anwar Nur Fahrudin, SSTP,M.Eng | IVa |
| 3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Endang Yuni Kusmarwati,SE | III/d |
| 4 | Pengadministrasi Kepegawaian | Sri Sudiasih | III/b |
| 5 | Pramubhakti | Mujono | I/b |
| 6 | Kasubag Program Keuangan dan Aset | Totok Samiyanto | III/c |
| 7 | Analisis Perencanaan | Padminiastuti, SIP | III/d |
| 8 | Bendahara Rutin Pengeluaran | Ayunida Chofiyah FH, SE | III/c |
| 9 | Penyusun Data dan Informasi | Juli Hariyanto, Amd | II/d |
| 10 | Kasi Pemerintahan | Warjono, SIP | III/d |
| 11 | Pengadministrasi Umum | Sunaryo | III/b |
| 12 | Sekretaris Desa | Yuli Trisniati | II/c |
| 13 | Pengadministrasi Umum | Baron Nurcahyo | II/b |
| 14 | Kasi Ekbang dan LH | Drs. Moh Wahyudi Widodo, MSc | IVa |
| 15 | Analisis Program pembangunan | Sihatna, SP | III/d |
| 16 | Pengadministrasi Umum | Flaviana Sri Sugiyatni | III/b |

| No | Jabatan | Nama | Gol/ Ruang |
|----|--|------------------------------------|---------------|
| 17 | Pengadministrasi Umum | Agus Iswahyudi | III/b |
| 18 | Kasi Pelayanan | Mustika Nurhardiyati, S.sos | III/d |
| 19 | Pengelola Pelayanan dan Desimilasi Informasi | Nurwalaningsih | III/b |
| 20 | Pengelola Pelayanan dan Desimilasi Informasi | Tri Eka Murhardiyah | III/b |
| 21 | Kasi Trantib | Bambang Suprimantoro, S.sos | III/d |
| 22 | Analisis Keamanan | Lambang Gunarso, SST | III/c |
| 23 | Pengadministrasi Umum | Agus Hartana | III/b |
| 24 | Kasi Kemasyarakatan | Widodo Yulianto, SSn | III/d |

Jumlah pegawai pada Kecamatan Sewon sebanyak 28 pegawai dengan rincian:

- PNS unit kerja kecamatan : 23 orang
- Carik Desa : 1 orang
- Tenaga kontrak : 4 orang

Dilihat Jabatan Struktural :

- Eselon III a : 1 orang
- Eselon IIIb : 1 orang
- Eselon IV a : 5 orang
- Eselon IV b : 2 orang

Jumlah pegawai berdasarkan Golongan:

- Gol IV : 3 orang
- Gol III : 17 orang
- Gol II : 3 orang
- Gol I : 1 orang

Berdasarkan pendidikan, maka profil pegawai Kecamatan Sewon adalah sebagai berikut:

- Pasca Sarjana : 2 orang
- Sarjana : 9 orang
- D3/Sarmud : 1 orang
- SMA : 10 orang
- SMP : 1 orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kecamatan Sewon didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.1 Asset Kecamatan Sewon

| NO | JENIS | VOLUME | SATUAN | Kondisi |
|----|---------------------|--------|--------|---------|
| 1 | Tanah | 2.750 | M2 | Baik |
| 2 | Pendopo | 1 | Unit | Baik |
| 3 | Gedung Kantor | 3 | Unit | baik |
| 4 | Ruang Pelayanan | 1 | Unit | baik |
| 5 | Mushola | 1 | Unit | baik |
| 6 | Aula | 1 | Unit | Baik |
| 7 | AC | 10 | Unit | baik |
| 8 | Almari Kayu | 8 | Unit | baik |
| 9 | Almari/Rak Kaca | 3 | Unit | baik |
| 10 | Brankas | 1 | Unit | baik |
| 11 | Dispenser | 2 | Unit | baik |
| 12 | Filling/Almari Besi | 4 | Unit | baik |
| 13 | Filling Cabinet | 10 | Unit | baik |

| NO | JENIS | VOLUME | SATUAN | Kondisi |
|----|-----------------------------|--------|--------|---------|
| 14 | Genset | 1 | Unit | baik |
| 15 | Handy Talky | 1 | Unit | baik |
| 16 | Hardisk Ekstrenal | 1 | Unit | baik |
| 17 | Ipphone | 1 | Unit | baik |
| 18 | Jam Dinding | 7 | Unit | baik |
| 19 | Kamera Digital | 1 | Unit | baik |
| 20 | Kipas Angin | 2 | Unit | baik |
| 21 | Komputer | 9 | Unit | baik |
| 22 | Laptop | 4 | Unit | baik |
| 23 | Kursi Biro | 4 | Unit | baik |
| 24 | Kursi Biro/Putar | 1 | Unit | baik |
| 25 | Kursi Kerja/Kayu | 26 | Unit | baik |
| 26 | Kursi Rapat | 65 | Unit | baik |
| 27 | Kursi Tunggu Kayu | 5 | Unit | baik |
| 28 | Kursi Tunggu Besi | 3 | Unit | baik |
| 29 | Lambang Garuda | 1 | Unit | baik |
| 30 | Layar Proyektor | 1 | Unit | baik |
| 31 | Lcd Proyektor | 1 | Unit | baik |
| 32 | Loudspeker | 2 | Unit | baik |
| 33 | Meja Tik | 9 | Unit | baik |
| 34 | Meja Biro | 5 | Unit | baik |
| 35 | Meja Komputer | 3 | Unit | baik |
| 36 | Meja Kursi Tamu | 3 | Unit | baik |
| 37 | Meja Rapat | 18 | Unit | baik |
| 38 | Meja Tulis/Setengah Biro | 32 | Unit | baik |

| NO | JENIS | VOLUME | SATUAN | Kondisi |
|----|-----------------|--------|--------|---------|
| 39 | Mesin Ketik | 2 | Unit | Baik |
| 40 | Mimbar Upacara | 1 | Unit | Baik |
| 41 | Papan Data | 4 | Unit | Baik |
| 42 | Pesawat Telepon | 1 | Unit | Baik |
| 43 | Printer | 8 | Unit | Baik |
| 44 | Rak Kayu | 4 | Unit | Baik |
| 45 | Salon Speker | 2 | Unit | Baik |
| 46 | Sound System | 2 | Unit | Baik |
| 47 | Televisi | 2 | Unit | Baik |
| 48 | Tiang Bendera | 1 | Unit | Baik |
| 49 | Tikar / Karpets | 1 | Unit | Baik |
| 50 | Wireless | 1 | Unit | Baik |

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja kecamatan Sewon selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kecamatan Sewon Tahun 2011-2015 Kecamatan Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

| No | Indikator Kinerja | Target Renstra Tahun 2011 - 2015 | | | | | Realisasi Capaian Renstra Tahun 2011 - 2015 | | | | | Rasio Capaian | | | | |
|-----|---|----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)= (8)/(3) | (14)= (9)/(4) | (15)= (10)/(5) | (16)= (11)/(6) | (17)= (12)/(7) |
| A. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | NA | NA | NA | NA | 80 | NA | NA | NA | NA | 80.16 | NA | NA | NA | NA | 1.002 |
| 2. | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | NA | NA | NA | NA | 60 | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 1.66 |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | NA | NA | NA | NA | 70 | NA | NA | NA | NA | 70 | NA | NA | NA | NA | 1 |
| 4 | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 1 |
| 5 | Pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan (PATEN) | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 1 |
| 6 | Nilai AKIP Kecamatan | NA | NA | NA | NA | 65 | | | | | 100 | NA | NA | NA | NA | 0 |

ket: Indikator Kinerja Kecamatan sesuai dengan tabel diatas dimulai pada tahun 2015

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Sewon dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat di terima sehinggaantisipasi permasalahan menjadi terlambat.
- c. Perubahan Perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Kecamatan Sewon dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- d. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- e. Adanya internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan
- f. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sewon masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Sewon

| No | Masalah pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|----|--|--|--|
| 1. | Pelayanan kepada masyarakat belum optimal | - Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai | 1. Ruang pelayanan kurang luas 2. Sarana penunjang yang ada belum lengkap 3. Terbatasnya blangko dokumen kependudukan. |
| | | Kemampuan SDM belum optimal | Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM |
| 2. | Masih adanya desa yang belum menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu | Koordinasi dan kualitas SDM kecamatan dan desa dalam perencanaan dan pelaporan belum optimal | Kurangnya diklat perencanaan dan pelaporan bagi SDM yang menangani |
| 3. | Masih adanya ketidaksesuaian APBDes dengan RPJMDes | Kurang cermatnya penyusunan dokumen APBDes dengan RPJMDes | Kompetensi SDM kurang memadai |
| 4. | Realisasi usulan Musrenbang Kecamatan belum optimal | Masih adanya usulan program prioritas yang tidak terealisasi. | Tidak lengkapnya data usulan yang disampaikan dalam musrenbang Kecamatan |

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

1. **Sehat** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
2. **Cerdas** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.
3. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
4. **Kemanusiaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.
5. **Kebangsaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
6. **Keagamaan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.

4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka tugas dan fungsi Kecamatan Sewon terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi”. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

| No | Misi ke-1 | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|----|---|---|---|
| 1. | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi | Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah kecamatan dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal | Keterbatasan SDM Kecamatan dalam rangka menghadapi tuntutan publik akan adanya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), yang benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku serta mampu menciptakan kepuasan dan mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat. |
| | | Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi | Rendahnya pola pikir (<i>mindset</i>) melayani masyarakat |
| | | Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) | Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan |

| | | |
|--|--|---|
| | | efisien |
| | Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja | Belum optimalnya kualitas sumberdaya aparatur |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Sewon tidak ada renstra Kementerian Dalam Negeri yang terkait dengan Kecamatan Sewon.

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kecamatan Sewon tidak ada renstra Perangkat Daerah DIY yang terkait dengan Kecamatan Sewon.

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS

3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon Ditinjau dari Implikasi RTRW

| No | Telaahan RTRW terkait Tupoksi Kecamatan Sewon | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|----|---|--|--|
| 1. | Kawasan peruntukan pariwisata | Dalam pengembangan pariwisata mempunyai menjadi peluang untuk dijadikan pengembangan obyek wisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transaksi | Kompetisi daerah wisata di daerah lain yang juga memiliki keunggulan wilayahnya masing masing dan penataan sarana prasarana wisata |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--------------------------------|
| | | ekonomi bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraannya. Beberapa lokasi diantaranya yang menjadi obyek wisata, seperti Desa Panggungharjo dengan desa wisatanya embung dan kulinernya kampung Mataraman | belum dilakukan secara optimal |
| 2. | Kawasan Peruntukan Permukiman | Kecamatan Sewon merupakan kawasan permukiman perkotaan, memberikan peluang bagi pengusaha property. | Masalah kerawanan sosial |
| 3. | Kawasan peruntukan lainnya | Kecamatan Sewon merupakan kawasan peruntukan yaitu Akademi Kebidanan dan Sekolah Tinggi Tehnologi Kulit | Masalah isu SARA |

3.4.2. Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Sewon Ditinjau dari Implikasi KLHS

| No | Telaahan KLHS terkait Tupoksi . Kecamatan Sewon | Faktor Pendorong | Faktor Penghambat |
|----|---|---|---|
| 1. | Banyaknya kawasan perumahan | Sewon merupakan kawasan perkotaan yang memberikan peluang bagi pengusaha properti | <ul style="list-style-type: none"> - Mengancam kerusakan lingkungan - Masih banyak Lahan hijau di wilayah kecamatan Sewon |
| 2. | Masih ada permasalahan buang sampah sembarangan | Adanya komitmen warga untuk mengelola sampah mandiri | <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan - Rendahnya penegakan peraturan terhadap kegiatan yang berdampak pencemaran lingkungan |

Namun demikian berdasarkan kajian KLHS terhadap isu strategis pembangunan yang potensial menimbulkan dampak negatif terkait dengan isu pembangunan yang berkelanjutan, semua program yang dilaksanakan Kecamatan tidak berdampak negatif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Sewon sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka

diperoleh isu-isu strategis Kecamatan Sewon yang akan ditangani pada periode Tahun 2016-2021 yang tersisa tiga tahun kedepan (2019-2021) adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Daya dukung Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan dan kemandirian desa untuk melakukan percepatan pembangunan desa dan mendorong terciptanya kemandirian desa itu sendiri melalui Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menuntut lebih banyak peran Kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa.
- 3) Kecamatan Sewon belum memiliki Perencanaan Terpadu Pengembangan Wisata (Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Religi, Kesenian dan Wisata Kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang mensejahterakan masyarakat seperti Wisata Minat Khusus. Maka Kecamatan harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Tingkat kompetisi produk kerajinan yang cukup tinggi di pasar kerajinan, baik produk dari pengrajin lokal maupun produk dari luar negeri, Kecamatan berupaya mendorong pengembangan inovasi produk kerajinan agar mampu bersaing dan mengikuti perkembangan pasar.
- 5) Penataan kawasan budidaya perikanan air tawar.
Peran pemerintah pusat lewat pemerintah propinsi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul mempunyai peran penting dalam melaksanakan penataan kawasan budidaya ikan air tawar, hal ini dapat dilihat dari tingginya konsumsi ikan air tawar oleh masyarakat.
- 6) Alih fungsi lahan pertanian
Regulasi terkait RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan) sebagai bentuk tindaklanjut dari Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kecamatan Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Sewon

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Capaian Indikator Kinerja | | Target Indikator Kinerja | | | |
|-----|--|--|---|---------------------------|------|--------------------------|------|------|------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70 | 80 | 85 | 86 | 87 | 89 |
| 2. | Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | Persentase desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 80 | 85 | 90 | - | - | - |
| | | | Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu | - | - | - | 95 | 100 | 100 |
| | | | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 |
| | | | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 |

BAB V.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Sewon

| VISI : | | | |
|--|--|---|---|
| Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat,cerdas dan sejahtera,berdasarkan nilai-nilai agamaan,kemanusiaan,dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) | | | |
| MISI ke 1 : | | | |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,efektif,efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi | | | |
| Tujuan PD | Sasaran PD | Strategi | Arah Kebijakan |
| Terwujudnya pelayanan pada masyarakat yang prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | 1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan sarana prasarana layanan public | 1. Mengembangkan model layanan berbasis TI |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pasrtisipatif | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | 1. Peningkatnya system dan tata kelola perencanaan pembangunan | 1. Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan desa |

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kecamatan Sewon disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|--|---|--|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima | Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat | Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 77.83 | | 80.45 | 33,010,000 | 85 | 32,560,000 | 90 | 33,215,000 | | 33,657,000 | | | Kecamatan Sewon |
| | | Peningkatan pelayanan masyarakat | | | 4,104,000 | | | | | | | | 33,657,000 | | 35,340,000 | |
| | | | Jumlah sosialisasi pelayanan masyarakat | 40 | 4,104,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Jumlah sosialisasi Paten | | | | | | | | | 6 | 16,828,500 | 6 | 17,670,000 | |
| | | | Jumlah sosialisasi Admin duk | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16,828,500 | 6 | 17,670,000 | - |
| | | Program Pelayanan Administrasi | | | | 100 | 282,993,500 | 100 | 313,050,000 | 100 | 308,889,600 | | | | | Kecamatan Sewon |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan jasa , peralatan dan Perlengkapan Perkantoran | | | 12 | 156,202,500 | 12 | 215,250,000 | 12 | 197,039,600 | | | | | |
| | | | Jumlah kendaraan yang dibiayai | | | | | | | | | 11 | 2,600,000 | 11 | 2,600,000 | |
| | | | Jumlah pengelola keuangan dan barang | | | | | | | | | 84 | 19,080,000 | 84 | 19,080,000 | |
| | | | Jumlah honorer | | | | | | | | | 60 | 90,000,000 | 60 | 90,000,000 | |
| | | | Jumlah jenis atk | | | | | | | | | 40 | 12,458,000 | 40 | 12,458,000 | |
| | | | Jumlah meterai | | | | | | | | | 350 | 1,500,000 | 350 | 1,500,000 | |
| | | | Jumlah jenis peralatan dan bahan kebersihan | | | | | | | | | 22 | 5,382,000 | 22 | 5,382,000 | |
| | | | Jumlah pembayaran listrik | | | | | | | | | 12 | 43,200,000 | 12 | 43,200,000 | |
| | | | Jumlah pembayaran langganan | | | | | | | | | 12 | 780,000 | 12 | 780,000 | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | air | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pembayaran langganan telepon | | | | | | | | | 12 | 3,900,000 | 12 | 3,900,000 | |
| | | | Jumlah pegawai yang dibiayai premi asuransi kesehatan | | | | | | | | | 60 | 1,080,000 | 60 | 1,080,000 | |
| | | | Jumlah pegawai yang dibiayai premi asuransi ketenagakerjaan | | | | | | | | | 60 | 216,000 | 60 | 216,000 | |
| | | | Jumlah penggandaan dokumen | | | | | | | | | 41222 | 6,955,600 | 41222 | 6,955,600 | |
| | | | Jumlah cetak brosur | | | | | | | | | 5 | 450,000 | 5 | 450,000 | |
| | | | Penyediaan rapat-rapat, kootrdinasi dan konsultasi | | | 12 | 111,491,000 | 12 | 97,800,000 | 12 | 111,850,000 | 12 | 111,850,000 | 12 | 121,850,000 | |
| | | Program Peningkatan Sarana | | 100 % | 195,062,000.00 | 100 | 178,419,800 | 100 | 304,795,000 | 100 | 153,605,400 | | | | | Kecamatan Sewon |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah jenis pengadaan peralatan perlengkapan kantor | 6 | 67,500,000.00 | 2 | 57,545,600 | 2 | 90,350,000 | 1 | 33,285,400 | 12 | 62,000,000 | 12 | 82,000,000 | |
| | | Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor | Jumlah rehab gedung dan bangunan kantor | | | | | | | | | 1 | 33,324,000 | 1 | 38,964,000 | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | Cakupan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 6 | 75,840,000.00 | 6 | 69,900,000 | 6 | 65,420,000 | 9 | 59,600,000 | 100% | 61,600,000 | 100% | 62,600,000 | |
| | | | Jumlah kendaraan dinas dipelihara | | | | | | | | | 22 | | 22 | | |
| | | | jumlah pembelian bbm | | | | | | | | | 4,000 | | 4,000 | | |
| | | | Jumlah servis | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| | | | Jumlah pembelian bbm | | | | | | | | | 4,000 | | 4,000 | | |
| | | | Jumlah pembelian suku cadang | | | | | | | | | 11 | | 11 | | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|---|--|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah pembelian suku cadang | | | | | | | | | 6 | | 6 | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan | Jumlah cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan | 9 | 51,722,000.00 | | 57,545,600 | 16 | 134,025,000 | | 44,920,000 | 100% | 15,800,000 | 100% | 15,800,000 | |
| | | | jumlah servis toner | | | | | | | | | 60 | | 60 | | |
| | | | Jumlah servis ac | 6 | 75,840,000.00 | 6 | 69,900,000 | 6 | 65,420,000 | 9 | 59,600,000 | 14 | | 14 | | |
| | | | Jumlah servis komputer | 9 | 51,722,000.00 | | 57,545,600 | 16 | 134,025,000 | | 44,920,000 | 5 | | 5 | | |
| | | | Jumlah servis printer | | | | | | | | | 8 | | 8 | | |
| | | | Jumlah alat | | | | | | | | | 3 | | 3 | | |
| | | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | 100 | 10,872,000.00 | 100.00 | 765,000 | 100 | 1,650,000 | 100 | 2,250,000 | | | | | Kecamatan Sewon |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|--|--|---|--|---------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | Jumlah dokumen | 5 | 10,872,000.00 | 5.00 | 765,000 | 5 | 1,650,000 | 5 | 2,250,000 | 8 | 2,350,000 | 8 | 2,469,000 | |
| Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif | Meningkatnya kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan wilayah | Program Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan | Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan | | | 100 | 111,437,500 | | 150,825,000 | 100 | 227,275,000 | | | | | Kecamatan Sewon |
| | | Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya | jumlah makan minum rakor | - | - | 100 | 2.850.000 | 300 | 5.250.000 | - | 5.250.000 | - | - | - | - | - |
| | | Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah makan minum pesrta | - | - | - | - | 150 | 2.625.000 | - | 2.625.000 | | | | | |
| | | Peningkatan keimanan dan ketaqwaan | | - | - | - | - | - | - | - | 21.400.000 | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | kepemudaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan organisasi kepemudaan | | - | - | - | - | - | - | - | 9.600.000 | | | | | |
| | | Fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah | jumlah kegiatan | - | - | 6 | 16.300.000 | 6 | 28.525.000 | - | 87.100.000 | | | | | |
| | | Fasilitasi kelancaran pelaksanaan demokrasi | jumlah kegiatan | - | - | 12 | 3.420.000 | 0 | 0 | - | 4.200.000 | | | | | |
| | | Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi | jumlah kegiatan | - | - | 12 | 55.260.000 | 12 | 70.000.000 | - | 59.950.000 | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Lomba Desa | jumlah kegiatan | - | - | 1 | 4.987.500 | 1 | 6.125.000 | - | 6.125.000 | | | | | |
| | | Bantul Ekspo dan Karnaval | jumlah kegiatan | - | - | 1 | 10.407.500 | 1 | 11.650.000 | - | 18.075.000 | | | | | |
| | | Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan | Jumlah UMK terbina | - | - | - | - | 50 | 5.950.000 | - | 12.950.000 | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|-----------------------|------------|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pembinaan sosial budaya dan keagamaan | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 229,070,000.00 | | 229,070,000 | |
| | | | Jumlah Pembinaan Karang Taruna | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,800,000 | 2 | 6,800,000 | |
| | | | Jumlah senam SKJ bersama muspika | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,800,000 | 12 | 1,800,000 | |
| | | | Jumlah kegiatan Gerak jalan bersama Muspika | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 58,250,000 | 1 | 58,250,000 | |
| | | | Jumlah latihan bola voli | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1,700,000 | 4 | 1,700,000 | |
| | | | Jumlah pertemuan GOPTKI kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2,625,000 | 1 | 2,625,000 | |
| | | | Jumlah pelaksanaan PSN | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 13,200,000 | 88 | 13,200,000 | |
| | | | Jumlah lomba FASI | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,500,000 | 2 | 3,500,000 | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah kegiatan pengajian di kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10,300,000 | 2 | 10,300,000 | |
| | | | Jumlah pembinaan PKK Kecamatan | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 19,670,000 | 6 | 19,670,000 | |
| | | | Jumlah kegiatan FKUB (forum kerukunan umat beragama) | | | | | | | | | 1 | 8,675,000 | 1 | 8,675,000 | |
| | | | Jumlah pemantauan UNAS | | | | | | | | | 6 | 1,500,000 | 6 | 1,500,000 | |
| | | | Jumlah pendampingan lomba UKS | | | | | | | | | 1 | 1,400,000 | 1 | 1,400,000 | |
| | | | Jumlah peserta pendampingan lomba KKR | | | | | | | | | 1 | 2,450,000 | 1 | 2,450,000 | |
| | | | Jumlah peserta pendampingan lomba PMTAS | | | | | | | | | 1 | 2,100,000 | 1 | 2,100,000 | |
| | | | Jumlah latihan persiapan lomba | | | | | | | | | 2 | 8,000,000 | 2 | 8,000,000 | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----|-------------|--------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------------|------------|------------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | MTQ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan festival budaya daerah | | | | | | | | | 3 | 87,100,000 | 3 | 87,100,000 | |
| | | Pendampingan pengentasan kemiskinan di kecamatan | | - | - | - | - | - | - | - | - | | 1,400,000 | | 1,400,000 | |
| | | | Jumlah pembinaan Tim TKPK | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,400,000 | 2 | 1,400,000.00 | |
| | | Program Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan | Cakupan pemerintahan Umum Kecamatan | | | 100% | 180,812,000 | 100% | 176,520,000 | 100 | 242,400,000 | | | | | Kecamatan Sewon |
| | | Penyusunan Profil Desa, Monografi kecamatan | jumlah dokumen | - | - | 1 | 1.140.000 | 1 | 2.800.000 | | 2.800.000 | | | | | |
| | | Pengendalian keamanan lingkungan | jumlah monitoring | - | - | 12 | 10.396.000 | 12 | 9.600.000 | | 10.550.000 | | | | | |
| | | Peningkatan peran | jumlah kegiatan | - | - | 1 | 1.710.000 | 2 | 1.600.000 | | 1.600.000 | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|---|---|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----|------------|----|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa | jumlah kegiatan | - | - | 7 | 55.647.500 | 8 | 84.675.000 | | 143.825.000 | | | | | |
| | | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah | jumlah kegiatan | - | - | 4 | 3.420.000 | 4 | 4.200.000 | | 4.200.000 | | | | | |
| | | Fasilitasi dan pengendalian pengelolaan keuangan desa | jumlah rakor | - | - | 12 | 2.850.000 | 8 | 5.250.000 | | 3.500.000 | | | | | |
| | | rapat koordinasi unsur Muspika | jumlah rakor | - | - | 12 | 94.448.500 | 4 | 55.245.000 | | 59.275.000 | | | | | |
| | | Pelaksanaan rakorpem desa | jumlah kegiatan | - | - | 12 | 2.850.000 | 0 | 0 | | 3.500.000 | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Musrenbang Tingkat Kecamatan | jumlah kegiatan | - | - | 1 | 8.350.000 | 1 | 13.150.000 | | 13.150.000 | | | | | |
| | | Peningkatan wawasan kebangsaan | Jumlah latihan persiapan lomba Upacara 25 orang X 6 latihan | | | | | | | | | 6 | 7,500,000.00 | 6 | 7,500,000.00 | |
| | | | Jumlah upacara HUT RI | | | | | | | | | 1 | 120,425,000.00 | 1 | 120,425,000.00 | |
| | | | Jumlah upacara hari-hari besar Nasional | | | | | | | | | 8 | 8,000,000.00 | 8 | 8,000,000.00 | |
| | | | Jumlah upacara peringatan hari jadi kab. Bantul | | | | | | | | | 1 | 4,435,000.00 | 1 | 4,435,000.00 | |
| | | | Jumlah rakor forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) | | | | | | | | | 1 | 4,900,000.00 | 1 | 4,900,000.00 | |
| | | | Jumlah sosialisasi napza | | | | | | | | | 1 | 2,800,000.00 | 1 | 2,800,000.00 | |
| | | Pengendalian keamanan | Jumlah sosialisasi siaga | | | | | | | | | 1 | 2,800,000.00 | 1 | 2,800,000.00 | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--------|---------|--|--|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|--------------|----|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | lingkungan dan penanggulangan bencana | bencana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pengiriman Linmas di TMMD | | | | | | | | | | 3 | 5,250,000.00 | 3 | 5,250,000.00 | |
| | | | Jumlah pertemuan kegiatan FKDM (forum kewaspadaan dini masyarakat) | | | | | | | | | | 1 | 7,970,000.00 | 1 | 7,970,000.00 | |
| | | | Jumlah pelaksanaan kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS) | | | | | | | | | | 2 | 1,960,000.00 | 2 | 1,960,000.00 | |
| | | Pengendalian tata kelola pemerintahan | Jumlah rakorpem desa | | | | | | | | | | 4 | 3,500,000.00 | 4 | 3,500,000.00 | |
| | | | Jumlah rakor pengendalian keuangan desa | | | | | | | | | | 4 | 3,500,000.00 | 4 | 3,500,000.00 | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------|---------|--|---|--|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Kegiatan pembinaan organisasi perempuan | jumlah rakor | - | - | 9 | 11.020.000 | 6 | 16.950.000 | | 19.670.000 | | | | | |
| | | Pemberdayaan petani | jumlah kegiatan | - | - | 1 | 3.420.000 | 4 | 3.900.000 | | 7.000.000 | | | | | |
| | | Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam | jumlah kegiatan | - | - | 1 | 2.850.000 | 2 | 5.100.000 | | 2.800.000 | | | | | |
| | | Pendampingan TMMD | Jumlah terkirim peserta TMMD | - | - | - | - | 50 | 1.750.000 | | 1.750.000 | | | | | |
| | | Pendampingan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah pemantauan kawasan bersih | - | - | - | - | 4 | 7.000.000 | | 9.100.000 | | | | | |
| | | Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah pertemuan dengan kelompok petani | | | | | | | | | 4 | 7,000,000 | 4 | 7,000,000 | |
| | | | Jumlah kegiatan kebersihan wilayah kantor kecamatan | - | | | | | | | | 1 | 1,600,000 | 1 | 1,600,000 | |

| Tujuan | Sasaran | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Proram Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | |
|--------|---------|--|---|--|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Tahun 2016 | | Tahun 2017 | | Tahun 2018 | | Tahun 2019 | | Tahun 2020 | | Tahun 2021 | | | |
| | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | bersama masyarakat dalam rangka mendukung penilaian Adipura | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah pameran di bantu ekspo | | | | | | | | | 1 | 18,075,000 | 1 | 18,075,000 | | |
| | | | Jumlah sosialisasi ijin IUMK | - | | | | | | | | 2 | 5,950,000 | 2 | 5,950,000 | | |
| | | | Jumlah pendampingan kemudahan formalisasi ijin PIRT | - | | | | | | | | 4 | 7,700,000 | 4 | 7,700,000 | | |
| | | | Jumlah pendampingan lomba desa | - | | | | | | | | 1 | 6,125,000 | 1 | 6,125,000 | | |
| | | | Jumlah pemantauan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah | | | | | | | | | 4 | 9,100,000 | 4 | 9,100,000 | | |
| | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan | Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG | - | | | | | | | | 1 | 14,150,000 | 1 | 15,150,000 | | |

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Sewon dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Sewon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Kinerja | Realisasi Indikator Kinerja | | Target Indikator Kinerja | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|---|-----------------------------|------|--------------------------|------|------|------|--|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 70 | 80 | 85 | 86 | 87 | 89 | 89 |
| 2 | Persentase Desa dengan penyelesaian perencanaan dan pelaporan tepat waktu | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes | 75 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| 4 | Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 |

Perubahan Renstra Kecamatan Sewon tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Kecamatan Sewon yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perencanaan Kecamatan Sewon serta berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2016-2021. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Kecamatan Sewon dalam menyusun Renja Kecamatan Sewon tahun 2019, 2020 dan 2021.

Bantul, 2019

Camat Sewon



DRS. DANANG IRWANTO, M.SI

NIP. 1964104199503001

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

KECAMATAN SEWON



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 24 Tahun 2008);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016-2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra PD Tahun 2016-2021 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021.
- (2) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran;
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
 - Bab VIII : Penutup.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Perubahan Renstra Inspektorat Daerah;
 - d. Perubahan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
 - e. Perubahan Renstra Badan Daerah;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Daerah;
 - g. Perubahan Renstra Kantor Daerah; dan
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan.
- (2) Perubahan Renstra Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Perubahan Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Perubahan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Perubahan Renstra Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan;
 - c. Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Perubahan Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
 - e. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perubahan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Perubahan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Perubahan Renstra Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
 - i. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renstra Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renstra Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renstra Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renstra Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu Perubahan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renstra Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. Perubahan Renstra Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renstra Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renstra Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renstra Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renstra Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renstra Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renstra Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renstra Kecamatan Bambanglipuro;

- i. Perubahan Renstra Kecamatan Kretek;
- j. Perubahan Renstra Kecamatan Pundong;
- k. Perubahan Renstra Kecamatan Sewon;
- l. Perubahan Renstra Kecamatan Jetis;
- m. Perubahan Renstra Kecamatan Imogiri;
- n. Perubahan Renstra Kecamatan Dlingo;
- o. Perubahan Renstra Kecamatan Pleret;
- p. Perubahan Renstra Kecamatan Banguntapan; dan
- q. Perubahan Renstra Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci Perubahan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 OKTOBER 2018

BUPATI BANTUL

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 OKTOBER 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


RIYANTONO

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

BUPATI BANTUL

SUHARSONO